

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI
NARAPIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi)**

Muhammad Ir Affandy *
Dr. Danialsyah, S.H.,M.H **
Dr. Marlina, S.H.,M.Hum ***

ABSTRAK

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi dalam pelaksanaannya diusulkan di sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi dan hasil sidang tersebut diusulkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selanjutnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat surat keputusan remisi narapidana. Dasar pemberian remisi pada narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pemberian remisi pada narapidana narkotika di Indonesia, bagaimana pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi, apakah kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani adalah narapidana melakukan tindakan indisipliner dan narapidana yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Narkotika Dan Psikotropika

* Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**IMPLEMENTATION OF REMISSION FOR DRUG PRISONERS
(Study at Class II B Tebing Tinggi Correctional Institution)**

Muhammad Ir Affandy *
Dr. Danialsyah, S.H.,M.H **
Dr. Marlina, S.H.,M.Hum ***

ABSTRACT

Remission is a reduction in the period of serving a sentence given to prisoners who meet the requirements stipulated in the laws and regulations. The implementation of remission for narcotics prisoners at the Class II B Tebing Tinggi Correctional Institution is carried out or proposed at a TPP (Correctional Observer Team) hearing or officers at the Class II B Tebing Tinggi Correctional Institution and the results of the hearing are proposed to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Then the Directorate General of Corrections makes a decision letter on the prisoner's remission. The basis for granting remission to narcotics and psychotropic prisoners at the Class II A Binjai Correctional Institution is Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Amendments to Government Regulation No. 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates. The formulation of the problem in this thesis is how the legal regulation of granting remission to drug convicts in Indonesia, how is the implementation of remission for drug convicts at the Class II B Tebing Tinggi Penitentiary, what are the obstacles in granting remission for drug convicts in the Class II B Tebing Tinggi Penitentiary who are not given remission for the sentences they have served

This type of research is normative and empirical juridical. This writing is descriptive analytical in nature which leads to empirical juridical research. The data collection tools are document studies and field research, namely by conducting research at the Class II B Tebing Tinggi Penitentiary

Based on the results of the study, it is known that the obstacles in granting remission for drug convicts in the Class II Binjai Penitentiary who are not given remission for the sentences they have served are convicts who commit indisciplinary actions and convicts who are still serving their sentences which are a requirement for remission provisions.

Keywords: Remission, Prisoners, Narcotics and Psychotropics

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

****Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*